

# **EKOLOGI SOSIAL ISLAM**

**Studi Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur**



**Oleh:**

**Muhammad Asyrafi**

**NIM: 23205012008**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asyrafi  
NIM : 23205012008  
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah Dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Asyrafi, S Pd

NIM : 23205012008

## BEBAS DARI PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asyrafi  
NIM : 23205012008  
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah Dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Asyrafi, S Pd

NIM : 23205012008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: Ekologi Sosial Islam: Studi Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur.

Yang ditulis oleh:

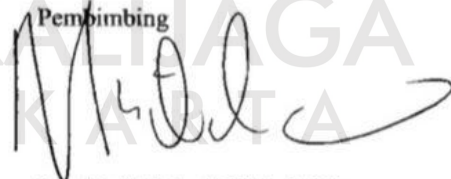
Nama	: Muhammad Asyrafi
NIM	: 23205012008
Fakultas	: Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah Dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 5 Desember 2025

Pembimbing



Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum

NIP. 19791213 200604 1 005





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2217/Un.02/DU/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : EKOLOGI SOSIAL ISLAM  
Studi Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ASYRAFI, S.Pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 23205012008  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69425082782dd



Penguji I

Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6942cca230a85



Penguji II

Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6942574f3e838



Yogyakarta, 11 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69439f2508af7

## ABSTRAK

Krisis ekologis di Kalimantan Timur tidak dapat dilepaskan dari pola pembangunan ekstraktif yang beroperasi melalui relasi kuasa hierarkis dan logika ekonomi eksploitatif. Dalam situasi tersebut, kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat lokal bukan sekadar dampak samping pembangunan, melainkan konsekuensi dari sistem sosial-politik yang menormalisasi dominasi atas alam dan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur dengan menggunakan kerangka Ekologi Sosial Islam, yaitu sintesis antara kritik struktural ekologi sosial Murray Bookchin dan etika lingkungan Islam sebagaimana dikembangkan oleh Fachruddin M. Mangunjaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap laporan dan publikasi JATAM, arsip media, dokumen kebijakan, serta literatur ekologi sosial dan etika Islam. Analisis diarahkan untuk mengkaji bagaimana dominasi sosial dan politik dalam tata kelola pertambangan menghasilkan ketidakadilan ekologis, sekaligus menilai bagaimana nilai-nilai keadilan, amanah, dan kepedulian sosial dalam Islam memperkuat praksis resistensi ekologis yang dijalankan JATAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, krisis ekologis di Kalimantan Timur merupakan ekspresi dari relasi dominasi sosial yang dilembagakan melalui kebijakan negara dan kepentingan korporasi, sehingga menempatkan alam sebagai komoditas dan masyarakat lokal sebagai pihak yang terpinggirkan. Kedua, gerakan JATAM tidak hanya berfungsi sebagai organisasi advokasi lingkungan, tetapi sebagai agen moral kolektif yang menerjemahkan kritik struktural terhadap ekstraktivisme ke dalam praktik gerakan berbasis keadilan sosial dan ekologis. Ketiga, kerangka Ekologi Sosial Islam memperlihatkan bahwa gerakan JATAM mengandung dimensi etis yang sejalan dengan prinsip Islam tentang amanah, larangan kerusakan, dan keadilan sosial, sekaligus mengafirmasi gagasan Bookchin mengenai pentingnya pembongkaran hierarki dan demokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Keempat, integrasi ekologi sosial dan etika Islam membuka perspektif baru bagi gerakan lingkungan di Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi sosial yang tidak hanya menolak kerusakan ekologis, tetapi juga mendorong pembentukan tatanan sosial-ekologis yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ekologi Sosial Islam, Gerakan JATAM, Krisis ekologis di Kalimantan Timur

## ABSTRACT

The ecological crisis in East Kalimantan cannot be separated from extractive development patterns that operate through hierarchical power relations and exploitative economic logic. In this situation, environmental damage and the suffering of local communities are not merely side effects of development, but consequences of a socio-political system that normalizes domination over nature and humans. This study aims to analyze the Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) movement in East Kalimantan using the framework of Islamic Social Ecology, which is a synthesis of Murray Bookchin's structural critique of social ecology and Islamic environmental ethics as developed by Fachruddin M. Mangunjaya. This study uses a descriptive qualitative approach with a documentary study method of JATAM reports and publications, media archives, policy documents, and literature on social ecology and Islamic ethics. The analysis aims to examine how social and political domination in mining governance results in ecological injustice, while also assessing how the Islamic values of justice, trustworthiness, and social concern strengthen JATAM's practice of ecological resistance. The results of the study show that, first, the ecological crisis in East Kalimantan is an expression of social domination relations institutionalized through state policies and corporate interests, thereby treating nature as a commodity and marginalizing local communities. Second, the JATAM movement functions not only as an environmental advocacy organization, but also as a collective moral agent that translates structural criticism of extractivism into practices based on social and ecological justice. Third, the Islamic Social Ecology framework shows that the JATAM movement contains ethical dimensions that are in line with Islamic principles of trust, prohibition of destruction, and social justice, while also affirming Bookchin's idea of the importance of dismantling hierarchies and democratizing the management of natural resources. Fourth, the integration of social ecology and Islamic ethics opens up new perspectives for the environmental movement in East Kalimantan as an effort at social transformation that not only rejects ecological destruction, but also encourages the formation of a more just, participatory, and sustainable socio-ecological order.

**Keywords:** Islamic Social Ecology, JATAM Movement, Ecological Crisis in East Kalimantan

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang telah mencurahkan limpahan kasih dan rahmatnya, serta saya panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Tesis ini saya persembahkan secara khusus kepada orang tua saya Ayahanda Junaidi Rahman dan Ibunda Nikmah Hairati, yang senantiasa selalu mendidik, merawat, memberikan kasih sayang sepenuh hati, membantu dan memberikan dorongan baik secara material maupun spiritual selama penulis menempuh studi dan penyelesaian Tesis ini. Semoga Allah SWT limpahan rahmat, kebaikan, kesehatan serta keselamatan senantiasa selalu tercurahkan kepadanya.

Kepada kakak dan adik tercinta Yulida Junaida dan Nia Aidina Rahman dan Muhammad Aliashfi Rahman yang telah menjadi salah satu semangat saya dalam menyelesaikan Tesis ini.





## **MOTTO**

“Menjaga alam berarti menjaga kehidupan.”



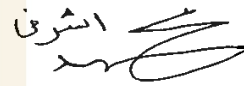
## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan berupa tenaga, dana, pemikiran, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

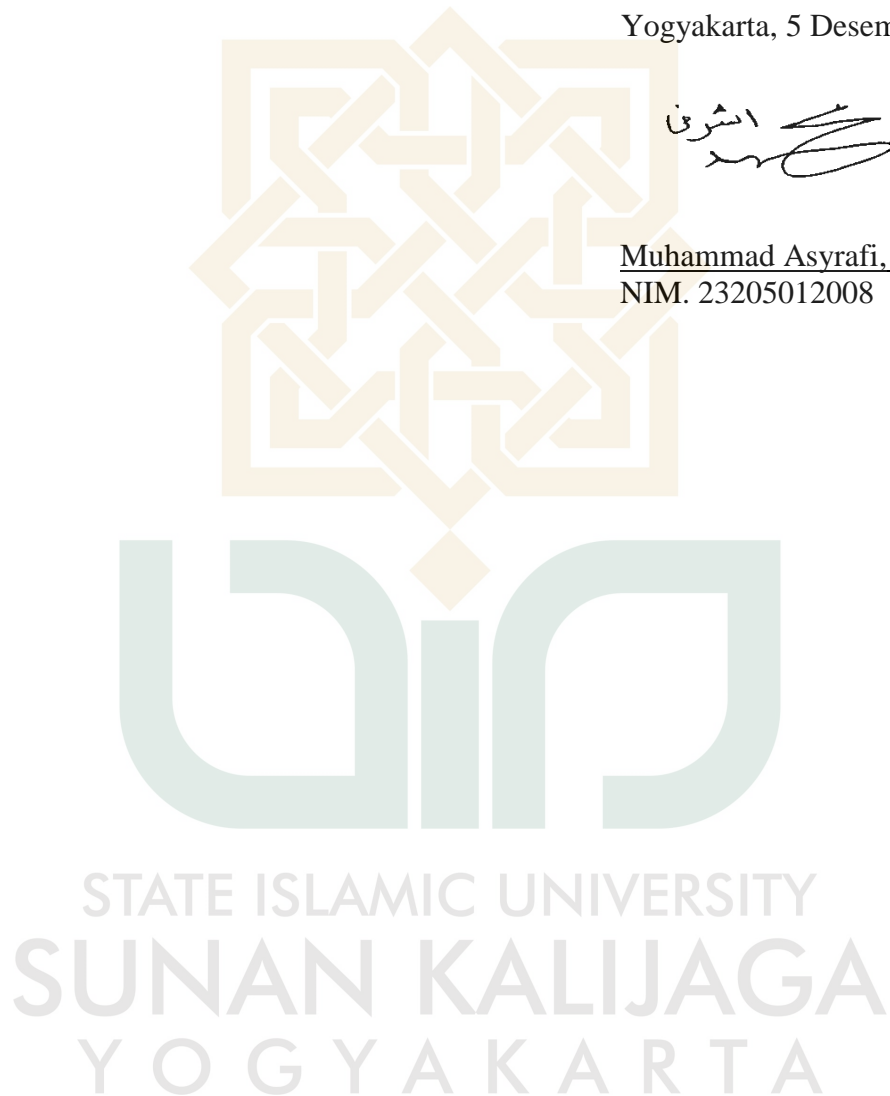
1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta seluruh jajaran.
2. Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam beserta jajaran.
3. Dr. Muhammad Fatkhan, M.Hum selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam beserta jajaran.
4. Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan dan masukan dari awal sampai proses akhir penelitian ini.
5. Kepada para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, khususnya di program studi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah banyak memberikan wawasan dalam proses pembelajaran.
6. Kepada orangtua tercinta Ayahanda Junaidi Rahman dan Ibunda Nikmah Hairati yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk peneliti.
7. Kepada teman-teman kelas Islamic Philosophy' 23 A: Imdad, Dimas, Yahya, Iwan, Akbar, Ardi, Taufiq, Fatih, Akmal, Dela, Erin, Zaenab yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menjalani kehidupan selama studi di kota ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala ketulusan dalam memberikan bantuan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Peneliti berharap semoga semua kebaikan budi mereka dinilai amal ibadah oleh Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih terdapat beberapa kekurangan, karena itu saran dan kritik diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini.

Yogyakarta, 5 Desember 2025



Muhammad Asyrafi, S.Pd  
NIM. 23205012008



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
BEBAS DARI PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM).....	29
A. Sejarah dan Latar Belakang Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).....	29
B. Basis Pengetahuan dan Nilai-Nilai Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).....	32
C. Strategi dan Praktik Jaringan advokasi Tambang (JATAM).....	36
BAB III.....	42
PERTAMBANGAN DAN ANCAMAN KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM.....	42
A. Konsep dan Relevansi Kutukan Sumber Daya Alam di Indonesia.....	42
B. Dinamika Pertambangan di Kalimantan Timur dan Dampak Sosial-Ekologisnya.....	49



C. Arah Resistensi terhadap Kutukan Sumber Daya Alam: Awal Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) .....	54
BAB IV .....	59
ANALISIS DAN KONTRIBUSI EKOLOGI SOSIAL ISLAM DALAM GERAKAN JATAM DI KALIMANTAN TIMUR.....	59
A. Analisis Ekologi Sosial Murray Bookchin terhadap Kutukan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur.....	59
1. Kutukan Sumber Daya Alam dan Relasi Dominasi Sosial di Kalimantan timur.....	59
2. Hierarki Sosial dan Institusionalisasi Dominasi dalam Politik Pertambangan di Kalimantan Timur.....	63
3. Dampak Sosial dan Ekologis terhadap Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur.....	67
B. Analisis Ekologi Islam Fachruddin Mangunjaya terhadap Krisis Lingkungan di Kalimantan Timur .....	72
1. Relasi Manusia dan Alam dalam Etika Sosial Islam .....	72
2. Pembangunan Ekstraktif dan Ketimpangan Ekologis di Kalimantan Timur. ....	78
3. Keadilan dan Keberlanjutan Lingkungan di Kalimantan Timur.....	83
C. Kontribusi Gerakan JATAM dalam Resistensi terhadap Kutukan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur .....	88
1. JATAM sebagai Aktor Sosial dalam Konflik Pertambangan di Kalimantan Timur.....	88
2. Advokasi dan Aksi Langsung JATAM sebagai Bentuk Perlawanan terhadap Dominasi Struktur di Kalimantan Timur .....	91
3. Refleksi Etis Keislaman atas Gerakan Resistensi Ekologis JATAM di Kalimantan Timur .....	95
D. Ekologi Sosial Islam sebagai Cara Pandang Baru atas Krisis Ekologis di Kalimantan Timur.....	99
1. Dominasi Sosial dan Etika Lingkungan dalam Ekologi Sosial Islam.....	99

2. Ekologi Sosial Islam sebagai Perspektif Kritis terhadap Pembangunan Ekstraktif.....	103
3. Relevansi Ekologi Sosial Islam bagi Masa Depan Gerakan Lingkungan di Kalimantan Timur.....	106
BAB V.....	111
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam sering dilihat sebagai potensi besar bagi pembangunan ekonomi. Namun realitas menunjukkan bahwa kelimpahan sumber daya tidak selalu menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat lokal. Malah, di banyak wilayah penghasil mineral atau batu bara, kelimpahan tersebut justru sering berujung pada ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai “kutukan sumber daya” (*resource curse*), situasi di mana sumber daya alam yang melimpah menyebabkan ketergantungan pada ekstraksi, kerentanan terhadap fluktuasi komoditas global, serta distribusi keuntungan yang timpang sehingga mayoritas masyarakat tidak mendapatkan manfaat proporsional.<sup>1</sup>

Dalam konteks negara dengan ketergantungan pada komoditas tambang seperti Indonesia, mekanisme kutukan sumber daya muncul melalui struktur pengelolaan sumber daya yang cenderung terpusat dan dikuasai korporasi besar, serta regulasi yang kurang responsif terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.<sup>2</sup> Ketika industri tambang menjadi tulang punggung ekspor dan

---

<sup>1</sup> Rini, Utari Retno Sulisty, Emanuel G. Manek, dan Kurnia Dewi Mulyani. “Analisis Potensi Resource Curse Melalui Efek Pengeluaran dan Akumulasi Modal pada Pertambangan Timah Bangka Belitung.” *Jurnal GEOSAPTA* Vol. 11 No.02 (Juli 2025). p. 4

<sup>2</sup> Sibatuara, Enjelina, dan Vera W. S. Soemarwi. “Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara di Indonesia.” *JSSH (Jurnal Serina Sosial Humaniora)* 1, no. 1 (2023). pp. 315-320.

sumber pendapatan nasional, kepentingan ekonomi jangka pendek sering menyingkirkan kepentingan ekologis dan hak masyarakat lokal.<sup>3</sup>

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu episentrum ekstraktivisme di Indonesia. Konsesi tambang batu bara dan mineral tersebar luas di sejumlah kabupaten/kota, yang menandakan bahwa ruang hidup masyarakat dan area ekosistem alami sudah sangat terkonversi menjadi wilayah pertambangan. JATAM Kaltim mencatat bahwa konsesi tambang yang aktif secara signifikan menguasai ruang hidup masyarakat tradisional dan komunitas adat di banyak wilayah.

Konversi lahan dan ruang hidup ini membawa konsekuensi serius terhadap cara hidup masyarakat yang hilangnya lahan pertanian, degradasi lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta ancaman terhadap ketahanan pangan, akses terhadap sumber daya alam lokal, dan keberlanjutan komunitas. Banyak komunitas adat dan masyarakat lokal yang kemudian menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi akibat tergeser dari ruang hidupnya.<sup>4</sup>

Krisis ekologis dan sosial yang muncul akibat ekstraktivisme tidak dapat dipisahkan dari struktur dominasi dalam masyarakat. Di sinilah teori ekologi sosial Murray Bookchin menjadi sangat relevan. Bookchin berargumentasi bahwa akar krisis lingkungan bukan sekadar kecacatan teknis atau regulasi, melainkan struktur sosial dominasi manusia terhadap manusia

---

<sup>3</sup> Saputro, Y. R., dan L. Makhasin. "Analisis Ekonomi Politik: Revisi atas Kebijakan Mineral dan Batu Bara Era Jokowi." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 9, no. 2 (2024): pp. 46–61.

<sup>4</sup> JATAM Kalimantan Timur. *Peringatan Dini Bencana Krisis Sosial Ekologi*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2024.



yang kemudian meluas menjadi dominasi manusia atas alam. Dalam karyanya, Bookchin menggagas bahwa *societal hierarchy* (hirarki sosial) dan struktur kekuasaan yang timpang adalah sumber dasar dari kerusakan ekologis.<sup>5</sup>

Menurut perspektif ekologi sosial, alam tidak boleh dianggap semata komoditas atau objek eksploitasi. Sebaliknya, manusia dan alam harus dipandang sebagai bagian dari komunitas yang saling berinteraksi dalam relasi egaliter dan harmonis.<sup>6</sup> Ketika struktur sosial bersifat hierarkis dan menempatkan alam sebagai objek subordinat, kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial menjadi tak terelakkan.<sup>7</sup>

Sejalan dengan kritik ekologi sosial, perspektif Ekologi Islam menawarkan kerangka etis yang menolak relasi dominatif antara manusia dan alam. Dalam pandangan Ekologi Islam, alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik dan merupakan bagian dari sistem kehidupan yang saling terkait. Manusia ditempatkan sebagai *khalifah* di bumi, bukan sebagai penguasa absolut, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ciptaan.<sup>8</sup> Perusakan alam dipandang sebagai bentuk *fasād* di muka bumi dan pengingkaran terhadap amanah Tuhan karena menempatkan kepentingan ekonomi di atas keberlangsungan kehidupan.

---

<sup>5</sup> Bookchin, Murray. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Oakland: AK Press, 2005. p. 63

<sup>6</sup> Wijaksono, Dwi Nur Akbar. *Ekologi Sosial: Pemikiran Murray Bookchin Mengenai Relasi Manusia dengan Alam*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.

<sup>7</sup> Bookchin, Murray. *Post-Scarcity Anarchism*. San Francisco: Ramparts Press, 1971.p. 184

<sup>8</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), pp. 45–52.

Ekologi Islam juga menekankan prinsip keadilan sebagai fondasi relasi manusia dan alam. Keadilan ekologis dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keadilan sosial, karena dampak kerusakan lingkungan paling besar justru dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.<sup>8</sup> Dengan demikian, pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat lokal tidak hanya bermasalah secara ekologis, tetapi juga secara moral dan spiritual. Perspektif ini memperkuat kritik terhadap model pembangunan ekstraktif yang beroperasi atas dasar dominasi dan akumulasi modal.

Dalam konteks Kalimantan Timur, dominasi korporasi tambang atas alam dan ruang hidup masyarakat mencerminkan bentuk struktur hierarkis seperti yang dikritik Bookchin dan bertentangan dengan prinsip Ekologi Islam. Konsesi luas, perizinan yang dikuasai elit, dan marginalisasi masyarakat adat menunjukkan bahwa hubungan manusia dan alam di wilayah tambang dijalankan berdasarkan logika akumulasi modal dan dominasi, bukan keadilan dan keberlanjutan.<sup>9</sup>

Penolakan terhadap logika dominasi ini muncul dalam bentuk resistensi, advokasi, dan perlawanan terhadap praktik ekstraktif, salah satunya oleh JATAM Kaltim. Organisasi ini mendokumentasikan berbagai kasus di mana masyarakat lokal dan adat kehilangan tanah ulayat, kehilangan sumber

---

<sup>9</sup> JATAM Kalimantan Timur. *Limbung di Gunung Layung*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2025.

penghidupan tradisional, serta menghadapi degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang.<sup>10</sup>

Laporan-laporan JATAM Kaltim menunjukkan bahwa dampak negatif tambang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan kultural yang termasuk pelanggaran hak asasi masyarakat adat, krisis ruang hidup, konflik lahan, dan ketidakpastian masa depan generasi berikutnya.<sup>11</sup> Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal bersama JATAM bukan sekadar menuntut perbaikan lingkungan, tetapi juga menuntut pengakuan hak atas ruang hidup, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya yang demokratis serta partisipatif.<sup>11</sup>

Realitas di Kalimantan Timur menunjukkan betapa kutukan sumber daya alam bukanlah sekadar istilah teori, melainkan dinamika struktural yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Konsesi tambang yang luas, regulasi tambang yang memihak modal, dan marginalisasi komunitas lokal menjadi bagian dari siklus konflik sosial-ekologis yang terus berulang jika tidak diinterupsi.<sup>12</sup>

Dengan mengintegrasikan teori ekologi sosial dan Ekologi Islam, analisis terhadap kondisi Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada dampak lingkungan dan ekonomi, tetapi juga pada relasi kekuasaan, nilai etis, dan

---

<sup>10</sup> JATAM Kalimantan Timur. *NYAPU: Bagaimana Perempuan dan Masyarakat Adat Balik Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaprojek Ibu Kota Baru Indonesia*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2023.

<sup>11</sup> JATAM Kalimantan Timur. *Dari Wisata Juang Menuju Kota Limbah Tambang*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2024.

<sup>12</sup> Taufiq, M. "Korelasi Pengelolaan Pertambangan dengan Cita-Cita Negara Hukum Kesejahteraan." *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 4, no. 3 (2024): 265–273.

tanggung jawab moral dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini membuka ruang untuk menilai ulang legitimasi pembangunan ekstraktif dan mendorong transformasi menuju pengelolaan sumber daya yang adil, berkelanjutan, partisipatif, serta selaras dengan nilai keadilan sosial dan etika ekologis.

Penelitian ini kemudian bermaksud mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kutukan sumber daya alam terwujud di Kalimantan Timur melalui mekanisme konsesi tambang, dominasi korporasi, marginalisasi masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan; serta bagaimana teori ekologi sosial dan Ekologi Islam dapat menjadi kerangka konseptual untuk menilai bentuk resistensi oleh masyarakat dan advokasi bersama seperti yang dilakukan JATAM Kaltim.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kutukan sumber daya alam terjadi di Kalimantan Timur dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?
2. Bagaimana JATAM melakukan resistensi untuk memperjuangkan hak masyarakat serta pemulihan ekologi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika kutukan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam konteks eksploitasi pertambangan, serta dampak sosial, ekonomi, dan ekologis



yang ditimbulkannya terhadap masyarakat lokal dan komunitas adat. Analisis ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana mekanisme ekstraktivisme bekerja melalui konsesi tambang, dominasi korporasi, dan kebijakan negara, sehingga menghasilkan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan memperparah kerentanan sosial-ekologis masyarakat.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan strategi resistensi yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak tambang serta mendorong upaya pemulihan ekologi. Penelitian ini berupaya memahami bentuk-bentuk advokasi, produksi pengetahuan, pendampingan masyarakat, dan mobilisasi sosial yang dilakukan JATAM sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam menantang dominasi industri ekstraktif dan menawarkan alternatif pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dalam pengembangan kajian Filsafat Islam, khususnya pada bidang etika lingkungan dan filsafat sosial Islam. Dengan memadukan teori Ekologi Sosial Murray Bookchin dan Ekologi Islam Fachruddin M. Mangunjaya, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman filosofis mengenai relasi antara manusia, alam, dan struktur sosial. Kajian ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak hanya bersumber dari persoalan teknis atau moral individual, tetapi juga dari struktur dominasi sosial dan kegagalan etika dalam menjalankan amanah kekhalifahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus

filsafat lingkungan Islam yang kritis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial-ekologis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati isu lingkungan dalam memahami gerakan advokasi lingkungan berbasis nilai-nilai keadilan sosial dan etika Islam, khususnya dalam konteks pertambangan di Kalimantan Timur. Selain itu, kajian ini dapat memberikan perspektif filosofis bagi gerakan masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan analisis kritis struktur sosial serta nilai-nilai etis Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Perdebatan mengenai eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan telah menjadi perhatian utama dalam berbagai kajian akademik. Fenomena kutukan sumber daya alam sering dikaitkan dengan bagaimana negara atau daerah yang kaya akan sumber daya justru mengalami ketimpangan ekonomi, korupsi, serta degradasi lingkungan. Kondisi ini juga berkelindan dengan resistensi masyarakat dalam bentuk gerakan sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu berusaha menentang kebijakan yang dianggap merugikan kehidupan mereka. Dalam konteks ini, berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji bagaimana mekanisme kutukan sumber daya alam bekerja serta bagaimana gerakan sosial menjadi alat resistensi dalam menanggapi fenomena tersebut.

*Pertama*, Fenomena kutukan sumber daya alam telah menjadi perdebatan luas dalam kajian ekonomi politik, terutama dalam konteks negara-negara yang kaya akan sumber daya alam namun mengalami stagnasi ekonomi, ketidakstabilan politik, serta tata kelola yang buruk. Shohibuddin dan Helmi (2024)<sup>13</sup> menegaskan bahwa permasalahan utama dalam kutukan sumber daya alam bukan hanya terletak pada kelimpahan sumber daya itu sendiri, tetapi lebih kepada ketimpangan dalam distribusi hasil eksploitasi. Ketimpangan ini sering kali menjadi pemicu utama konflik sosial, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat eksploitasi sumber daya. Dalam konteks Indonesia, misalnya, ketidakadilan dalam distribusi keuntungan pertambangan sering kali memicu perlawanan dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang merasa hak-haknya terabaikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya melihat ketimpangan distribusi sebagai sumber resistensi, tetapi menelaah bagaimana JATAM Kaltim memformulasikan resistensi tersebut menjadi gerakan moral kolektif yang terorganisir dan konsisten mengadvokasi keadilan ekologis.

Dalam studi ekonomi, Amalia (2023)<sup>14</sup> menguraikan bagaimana fenomena *Dutch Disease* memperburuk dampak kutukan sumber daya alam. Ia menjelaskan bahwa ekspor komoditas sumber daya alam dapat menyebabkan apresiasi nilai tukar mata uang domestik, yang pada akhirnya melemahkan

---

<sup>13</sup> Alfian Helmi Mohammad Shohibuddin, *Menghindari Kutukan Sumber Daya Alam* (Bogor Indonesia: IPB University, 2024), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/158710>.

<sup>14</sup> Finka Amalia and Zulfa Emalia, "Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam dan Natural Resource Curse Dalam Perspektif Ekonomi Di Pulau Sumatera", *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 01, no. 5 (2022), pp. 737–750.

daya saing sektor industri dan manufaktur. Kondisi ini membuat ekonomi negara semakin bergantung pada ekspor sumber daya alam dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Studi ini sangat relevan dengan kasus Indonesia yang masih sangat bergantung pada ekspor batu bara dan kelapa sawit, sementara sektor industri dan manufaktur kurang berkembang secara optimal.

Dengan demikian, resistensi terhadap kutukan sumber daya alam tidak hanya berbentuk perlawanan sosial, tetapi juga upaya diversifikasi ekonomi agar ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam dapat dikurangi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak fokus pada dampak makroekonomi seperti *Dutch Disease*, tetapi pada cara JATAM Kaltim membangun resistensi akar rumput dan advokasi publik untuk menekan dominasi ekonomi ekstraktif yang memperkuat ketergantungan tersebut.

Sementara itu, penelitian Bahrul Ulum (2023)<sup>15</sup> menyoroti bagaimana perlawanan terhadap kutukan sumber daya alam tidak hanya berbentuk protes dan demonstrasi, tetapi juga melalui advokasi kebijakan dan strategi hukum. Mereka menemukan bahwa di beberapa negara berkembang, kelompok masyarakat sipil dan organisasi lingkungan berhasil memanfaatkan instrumen hukum untuk menuntut perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, beberapa kemenangan hukum terhadap perusahaan tambang menunjukkan bahwa resistensi terhadap kutukan sumber daya alam

---

<sup>15</sup> Riskiyanto B. Ulum, "Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara: Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang Quarry Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.", *Social Studies*, vol. 8, no. 1 (2023), pp. 1–10.

dapat dilakukan secara strategis melalui jalur hukum dan advokasi berbasis data. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memeriksa lebih jauh bagaimana JATAM Kaltim mengintegrasikan advokasi hukum dengan riset lapangan, kampanye publik, dan mobilisasi komunitas sehingga resistensinya tidak hanya berorientasi pada litigasi, tetapi menjadi praksis politik-ekologis yang komprehensif.

Dari perspektif politik, Rahma (2020)<sup>16</sup> meneliti hubungan antara sumber daya alam dan rezim politik. Studi ini menemukan bahwa negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam cenderung memiliki rezim yang lebih otoriter. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan negara terhadap rente ekonomi dari eksploitasi sumber daya, yang membuat elite penguasa tidak terlalu bergantung pada pajak rakyat. Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan akuntabilitas terhadap masyarakat dan lebih fokus pada perlindungan kepentingan korporasi. Studi ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana banyak daerah penghasil sumber daya mengalami dinamika politik yang dipengaruhi oleh oligarki ekonomi yang berakar dari sektor ekstraktif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menelaah relasi antara rente sumber daya dan otoritarianisme, tetapi menelusuri bagaimana JATAM Kaltim melakukan perlawanan terhadap

---

<sup>16</sup> Hania Rahma, "Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Mekanisme Transmisi Fenomena Natural Resource Curse di Kalimantan Timur", *Auriga Nusantara*, vol. 11 (Jakarta Selatan, Indonesia, 2020), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

struktur kekuasaan tersebut melalui strategi advokasi, kampanye publik, dan pemingkaian wacana keadilan sosial-lingkungan.

Selain pada level nasional, dampak kutukan sumber daya alam juga terlihat dalam politik lokal. Sholikin (2020)<sup>17</sup> mengkaji bagaimana pemerintah daerah sering kali terjebak dalam tekanan politik dari aktor-aktor ekonomi seperti perusahaan tambang dan kelompok elite lokal. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah lebih memilih bekerja sama dengan korporasi besar daripada mendukung gerakan masyarakat sipil yang menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih adil. Ketidakseimbangan ini menciptakan polarisasi antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat lokal, yang sering kali berujung pada konflik sosial berkepanjangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji bagaimana JATAM Kaltim menghadapi konfigurasi kekuasaan lokal tersebut dan mengartikulasikan strategi resistensi yang mampu menggeser opini publik serta menantang hegemoni kebijakan ekstraktif di tingkat daerah.

*Kedua, Mengnail Gerakan Sosial*, dalam menghadapi dampak negatif eksploitasi sumber daya alam, berbagai gerakan sosial muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dan korporasi ekstraktif. Asyifani (2024)<sup>18</sup> dalam studinya mengenai *contentious politics* menyoroti bagaimana gerakan sosial di Indonesia menggunakan strategi internal dan eksternal dalam membangun koalisi melawan kebijakan eksploitasi sumber daya yang

---

<sup>17</sup> Ahmad Sholikin, "Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik", *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 12, no. 1 (2020), pp. 24–40.

<sup>18</sup> Khalis Asyifani, "Contentious Politics : Strategi Internal Dan Eksternal Mobilisasi Gerakan Sosial Dalam Koalisi", *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 13, no. 3 (2024), pp. 428–47.



dianggap merugikan masyarakat. Strategi internal melibatkan penguatan jaringan komunitas dan peningkatan kapasitas advokasi, sementara strategi eksternal mencakup penggunaan media sosial, kampanye internasional, serta aksi protes di ruang publik. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial dalam melawan eksploitasi sumber daya sering kali bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun aliansi dengan aktor-aktor lain, termasuk organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih mengerucut pada bagaimana JATAM Kaltim mengembangkan strategi resistensinya secara spesifik dalam konteks ekstraktivisme di Kalimantan Timur, termasuk pola kerja kolektif, pembentukan jaringan advokasi regional, dan relasi dengan gerakan ekologis nasional.

Gerakan perempuan juga memiliki peran penting dalam resistensi terhadap eksploitasi sumber daya alam. Zahana, Purnama, dan Sartika (2024)<sup>19</sup> dalam penelitiannya mengenai Kelompok Perempuan Pejuang Seribandung (KPPS) menemukan bahwa perempuan sering kali berada di garis depan dalam perjuangan mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan. Dampak langsung dari eksploitasi sumber daya, seperti kehilangan akses terhadap lahan pertanian dan sumber air, membuat perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Dengan pendekatan berbasis komunitas, gerakan perempuan ini berhasil meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak eksploitasi sumber

---

<sup>19</sup> Diana Dewi Sartika Yui Zahana, Dadang Hikmah Purnama, “Gerakan Sosial Kelompok Perempuan Pejuang Seribandung (Kpps) Dalam Konflik Tenurial Di Ogan Ilir”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol. 13, no. 2 (2024), pp. 556–574.

daya dan mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji posisi JATAM Kaltim sebagai gerakan advokasi yang tidak hanya memobilisasi kelompok rentan seperti perempuan, tetapi juga memformulasikan isu gender sebagai bagian dari kritik lebih luas terhadap model pembangunan ekstraktif yang menindas komunitas.

Selain itu, Arum Ambarwangi (2023)<sup>20</sup> meneliti bagaimana generasi muda turut berperan dalam gerakan sosial yang menentang eksploitasi sumber daya alam. Studi ini menunjukkan bahwa anak muda semakin aktif menggunakan media digital sebagai alat mobilisasi dan penyebaran informasi mengenai isu lingkungan. Media sosial telah menjadi sarana efektif untuk menggalang dukungan publik serta menekan pemerintah dan perusahaan agar lebih transparan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Studi ini memperlihatkan bahwa kehadiran anak muda dalam gerakan sosial tidak hanya memperluas basis dukungan gerakan, tetapi juga memberikan energi baru dalam strategi advokasi yang lebih kreatif dan inovatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menggambarkan peran anak muda secara umum, tetapi mendetailkan bagaimana JATAM Kaltim memanfaatkan ruang digital melalui kampanye visual, investigasi publik, serta produksi data alternatif untuk melawan narasi pembangunan ekstraktif.

---

<sup>20</sup> Arum Ambarwangi, "Keterlibatan Perempuan Dalam Gerakan Sosial", *Jurnal Komunikasi Massa*, vol. 13, no. 2 (2023), pp. 1–23.

Selain melalui kampanye dan advokasi, Muliono dan Nasuhaidi (2024)<sup>21</sup> meneliti bagaimana gerakan sosial anak muda juga berperan dalam demokrasi elektoral, terutama dalam memprotes politik dinasti yang sering kali berhubungan erat dengan eksploitasi sumber daya alam. Studi ini menemukan bahwa banyak elite politik berasal dari keluarga atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam industri ekstraktif, sehingga kebijakan mereka sering kali lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial yang dipimpin oleh anak muda berupaya mendorong perubahan melalui partisipasi politik yang lebih aktif, termasuk melalui kampanye anti-oligarki dan advokasi kebijakan yang lebih berkeadilan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana JATAM Kaltim memosisikan diri sebagai agen moral kolektif yang menantang oligarki tambang di Kalimantan Timur melalui strategi advokasi yang tidak hanya bersifat politik elektoral, tetapi juga berbasis riset, dokumentasi pelanggaran, dan pengorganisasian komunitas.

Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang berfokus pada dampak kutukan sumber daya alam secara umum atau bentuk gerakan sosial yang luas, penelitian ini akan lebih spesifik dalam mengkaji resistensi terhadap kutukan sumber daya alam dalam konteks gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim. JATAM Kaltim merupakan salah satu gerakan sosial yang secara aktif melawan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan ekstraktif

---

<sup>21</sup> Nasuhaidi Muliono, "Gerakan Sosial Anak Muda dalam Proses Demokrasi Elektoral 2024: Studi Gerakan Protes atas Politik Dinasti", *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME*, vol. 9, no. 4 (2024), pp. 307–13.

di Kalimantan Timur. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana JATAM Kaltim membangun strategi resistensi, baik melalui advokasi hukum, kampanye publik, maupun mobilisasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur mengenai kutukan sumber daya alam dan gerakan sosial, tetapi juga memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana gerakan sosial di tingkat lokal berperan dalam menentang eksploitasi sumber daya alam.

#### **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan prosedur ilmiah dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena berupaya memahami secara mendalam dinamika resistensi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur terhadap fenomena kutukan sumber daya alam melalui bahan-bahan tekstual dan dokumentatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti membongkar struktur makna, relasi kuasa, serta konteks sosial-politik yang melingkupi praktik ekstraktivisme di Kalimantan Timur, sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui proses interpretatif terhadap data tertulis.<sup>22</sup> Dengan demikian, penelitian

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), p. 15.

ini tidak mencari generalisasi statistik, melainkan pemahaman kritis dan kontekstual.

Jenis penelitian studi kasus dipilih karena kasus JATAM Kaltim merupakan satuan fenomena yang kaya, kompleks, dan berlapis-lapis, terutama terkait sikap kritis mereka terhadap struktur politik pertambangan. Studi kasus memungkinkan peneliti memfokuskan perhatian pada proses, dinamika internal, serta relasi antara wacana ekologis dan praktik advokasi yang dijalankan JATAM. Moleong menjelaskan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena secara mendalam melalui data tekstual, dokumen, dan konteks sosial di sekitarnya.<sup>23</sup> Dengan demikian, penelitian ini memusatkan analisis pada dokumen JATAM sebagai cerminan praksis resistensi ekologis.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan studi dokumentasi sebagai sumber utama penggalian informasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen JATAM Kalimantan Timur, terutama *Laporan Investigasi*, *Catatan Akhir Tahun*, siaran pers advokasi, publikasi digital, serta dokumen pendukung lain yang diterbitkan oleh JATAM selama rentang 2023–2025. Dokumen tersebut

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), p. 216.

dianggap sebagai data primer karena menggambarkan langsung sikap, kritik, dan analisis JATAM terhadap persoalan pertambangan di Kalimantan Timur.

Moleong menjelaskan bahwa dokumen dapat menjadi sumber data penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi sebagai rekaman tindakan, pemikiran, dan peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>24</sup> Dengan menggunakan dokumen, peneliti dapat memperoleh gambaran wacana, strategi gerakan, serta konstruksi realitas yang dibangun JATAM dalam menghadapi praktik ekstraktivisme.

Studi dokumentasi juga dilengkapi dengan literatur sekunder yang berkaitan dengan teori ekologi sosial, kutukan sumber daya alam, dan gerakan lingkungan. Langkah ini sejalan dengan pandangan Burhan Bungin bahwa penelitian kualitatif memerlukan penelusuran literatur untuk memperkuat pemaknaan data empiris dan membangun landasan teoritik yang kokoh.<sup>25</sup> Dengan demikian, teknik ini memastikan bahwa analisis tidak hanya berpijak pada dokumen organisasi, tetapi juga pada kerangka ilmiah yang lebih luas.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), p. 217.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), p. 103.



data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.<sup>26</sup> Tahapan ini berlangsung secara simultan sejak peneliti mulai berinteraksi dengan data, karena analisis kualitatif bersifat siklik dan reflektif.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi dari dokumen-dokumen JATAM sesuai fokus penelitian, yaitu: (1) kutukan sumber daya alam sebagai produk ketidakadilan sosial-politik; (2) wacana pembangunan sebagai legitimasi kerusakan alam; dan (3) peran JATAM sebagai agen moral kolektif. Bagian-bagian dokumen yang relevan disorot, dikoding, dan dipetakan untuk menemukan pola wacana, kritik struktural, serta narasi resistensi. Reduksi ini memungkinkan peneliti menempatkan data dalam hubungan langsung dengan konsep-konsep Murray Bookchin seperti hierarki, dominasi, ekologisme sosial, dan kritik terhadap industrialisme.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi ke dalam bentuk narasi tematik yang koheren. Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun dalam pola yang memudahkan peneliti membaca relasi antara praktik advokasi JATAM dan kerangka teoritik ekologi sosial. Penyajian data ini tidak berbentuk tabel statistik,

---

<sup>26</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), p. 20.

melainkan uraian konseptual yang memperlihatkan dinamika wacana, struktur kekuasaan, dan bentuk resistensi ekologis sebagaimana tertangkap melalui dokumen. Penyajian data dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan penarikan makna mendalam atas peran JATAM dalam konteks kutukan sumber daya alam.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sepanjang proses analisis, dengan menghubungkan temuan dokumentatif dengan teori ekologi sosial Bookchin. Kesimpulan tidak diambil secara tiba-tiba, tetapi melalui proses verifikasi berulang dengan cara membandingkan antar dokumen JATAM, membandingkan temuan dengan literatur pendukung, dan menilai konsistensi konsep-konsep yang muncul. Miles dan Huberman menegaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif harus diuji secara terus-menerus agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>27</sup> Pada tahap ini, teori Bookchin berfungsi sebagai perangkat untuk memahami bagaimana JATAM memaknai dan melawan struktur sosial yang menciptakan kutukan sumber daya alam di Kalimantan Timur.

**F. Kerangka Teori**

Krisis lingkungan yang meluas pada era modern telah mendorong lahirnya berbagai pendekatan teoretis yang berupaya memahami relasi manusia

---

<sup>27</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), p. 31.

dengan alam secara lebih kritis dan komprehensif. Dalam kajian ilmu sosial, ekologi tidak lagi dipahami sebagai persoalan biologis semata, melainkan sebagai medan relasi sosial yang sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Para pemikir seperti Allan Schnaiberg menunjukkan bahwa sistem produksi modern menciptakan tekanan ekologis yang bersifat struktural melalui apa yang disebut *treadmill of production*, yakni situasi ketika negara, kapital, dan teknologi saling memperkuat eksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup> Dalam kerangka ini, kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi sistemik dari pilihan pembangunan, bukan kecelakaan kebijakan.

Pendekatan kritis terhadap ekologi juga berkembang dalam tradisi ekonomi politik lingkungan. John Bellamy Foster mengemukakan konsep *metabolic rift* untuk menjelaskan keterputusan relasi metabolik antara manusia dan alam akibat logika kapitalisme industrial.<sup>29</sup> Produksi yang berorientasi akumulasi menyebabkan eksploitasi alam melampaui daya dukungnya, sekaligus meminggirkan komunitas yang bergantung langsung pada lingkungan. Dengan demikian, krisis ekologis selalu berkelindan dengan krisis sosial, khususnya ketimpangan kelas dan penguasaan sumber daya.

Dalam spektrum pemikiran tersebut, istilah ekologi sosial muncul sebagai kritik terhadap pendekatan lingkungan yang apolitis dan teknokratis. Ekologi sosial menegaskan bahwa relasi manusia dengan alam dibentuk oleh

---

<sup>28</sup> Allan Schnaiberg, *The Environment: From Surplus to Scarcity* (New York: Oxford University Press, 1980), p. 49.

<sup>29</sup> John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature* (New York: Monthly Review Press, 2000), p. 155.

struktur sosial, nilai budaya, dan sistem kekuasaan. Pemikir seperti Peter Kropotkin dan Lewis Mumford lebih awal menekankan pentingnya kerja sama sosial dan komunitas lokal dalam membangun hubungan yang harmonis dengan alam.<sup>30</sup> Ekologi sosial, dengan demikian, mengarahkan perhatian pada bagaimana hierarki, sentralisasi kekuasaan, dan dominasi menjadi akar persoalan ekologis.

Sementara itu, dalam tradisi Islam, relasi manusia dan alam telah lama menjadi bagian dari refleksi teologis dan etis. Alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan dan keteraturan (*sunatullah*), serta sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya (*āyāt kauniyyah*).<sup>31</sup> Sejumlah sarjana Muslim menegaskan bahwa krisis lingkungan modern merupakan refleksi dari krisis spiritual manusia yang memutus relasi sakral dengan alam. Seyyed Hossein Nasr melihat degradasi lingkungan sebagai akibat dari pandangan dunia modern yang menyingkirkan dimensi metafisis dan etika dalam relasi manusia-alam.<sup>32</sup>

Ekologi Islam kemudian berkembang sebagai pendekatan normatif yang menekankan konsep *khalifah*, *amanah*, dan *mīzān*. Konsep *khalifah* menempatkan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi dengan tanggung jawab moral menjaga keberlanjutan ciptaan, bukan sebagai penguasa absolut.<sup>33</sup>

Prinsip *mīzān* menegaskan bahwa alam diciptakan dalam keseimbangan, dan

---

<sup>30</sup> Lewis Mumford, *The City in History* (New York: Harcourt Brace, 1961). p. 24

<sup>31</sup> Toshihiko Izutsu, *God and Man in the Qur'an* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), pp. 89–91.

<sup>32</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Unwin, 1976), pp. 15–18.

<sup>33</sup> Fazlun M. Khalid, *Islam and the Environment* (London: Kube Publishing, 2002), p. 27.

pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekologis. Dengan demikian, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga pelanggaran etika dan spiritual.

Dalam perkembangannya, ekologi Islam tidak hanya hadir sebagai wacana moral individual, tetapi juga sebagai kritik terhadap pembangunan modern yang eksploitatif. Sarjana seperti Ibrahim Özdemir dan Mawil Izzi Dien menegaskan bahwa nilai-nilai Islam memiliki implikasi sosial dan politik yang kuat dalam isu keadilan lingkungan.<sup>34</sup> Ekologi Islam memandang bahwa ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan merupakan dua sisi dari krisis yang sama, sehingga solusi ekologis harus melibatkan transformasi struktur sosial.

Dalam ranah ekologi sosial modern, Murray Bookchin menjadi tokoh sentral yang merumuskan pendekatan sistematis terhadap hubungan antara krisis ekologis dan struktur sosial. Bookchin menolak pandangan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor populasi atau teknologi semata. Menurutnya, akar persoalan ekologis terletak pada sistem sosial yang hierarkis dan relasi dominasi yang menormalisasi penindasan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kritik terhadap kapitalisme, negara, dan bentuk-bentuk kekuasaan terpusat.

---

<sup>34</sup> Ibrahim Özdemir, "Environmental Ethics in Islam," *Islamic Studies* 42, no. 2 (2003): p. 193.

<sup>35</sup> Murray Bookchin, *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy* (Palo Alto: Cheshire Books, 1982), p. 27.

Bookchin mengembangkan gagasan bahwa dominasi manusia atas alam merupakan perpanjangan dari dominasi manusia atas manusia. Dalam masyarakat yang ditandai oleh hierarki kelas, patriarki, dan sentralisasi politik, alam direduksi menjadi objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi-politik.<sup>36</sup> Konsep *domination of nature* digunakan Bookchin untuk menggambarkan cara pandang yang menempatkan alam sebagai entitas pasif tanpa nilai intrinsik. Dalam konteks industri ekstraktif, cara pandang ini mewujud dalam praktik pertambangan skala besar yang mengabaikan keberlanjutan ekologis dan hak-hak masyarakat lokal.

Ekologi Sosial Bookchin juga menekankan bahwa kapitalisme bersifat tidak kompatibel dengan batas-batas ekologis. Logika akumulasi modal mendorong produksi dan konsumsi tanpa henti, sehingga eksploitasi sumber daya alam menjadi prasyarat utama keberlangsungan sistem.<sup>37</sup> Oleh karena itu, aktivitas pertambangan batu bara tidak dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi netral, melainkan sebagai manifestasi dari struktur kekuasaan dan kepentingan kapital global yang beroperasi melalui negara.

Selain kritik, Bookchin juga menawarkan visi transformasi sosial melalui demokrasi langsung, desentralisasi, dan basis komunitas. Ia menegaskan bahwa perubahan ekologis hanya mungkin tercapai jika masyarakat mampu membangun struktur sosial yang egaliter dan partisipatif.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Murray Bookchin, *The Ecology of Freedom*. p.65

<sup>37</sup> Murray Bookchin, *Remaking Society: Pathways to a Green Future* (Boston: South End Press, 1990), p. 18.

<sup>38</sup> Murray Bookchin, *The Philosophy of Social Ecology* (Montreal: Black Rose Books, 1990), p. 23.



Dalam kerangka ini, gerakan sosial lingkungan dipandang sebagai agen penting perubahan, bukan sekadar aktor penekan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, kerangka Ekologi Sosial relevan untuk membaca dinamika eksploitasi sumber daya alam. Provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan cadangan batu bara terbesar, namun justru mengalami degradasi lingkungan, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat lokal. Relasi antara negara, korporasi tambang, dan masyarakat menunjukkan pola hierarki yang mencerminkan analisis Bookchin tentang dominasi sosial dan ekologis.

Gerakan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur muncul sebagai respons terhadap kondisi tersebut. JATAM berperan sebagai jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi keadilan lingkungan, mengkritik kebijakan pertambangan, serta mendampingi komunitas terdampak tambang. Dalam perspektif Ekologi Sosial, JATAM dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kapitalisme ekstraktif dan negara yang memfasilitasinya.

Peran JATAM tidak hanya terbatas pada advokasi kebijakan, tetapi juga pada produksi pengetahuan kritis melalui riset, laporan, dan kampanye publik. Praktik ini sejalan dengan konsep *community intellectuals* dalam Ekologi Sosial, yaitu aktor akar rumput yang membangun kesadaran kritis dan tindakan kolektif berbasis pengalaman masyarakat.<sup>39</sup> Melalui kerja-kerja ini, JATAM

---

<sup>39</sup> Bookchin, *Remaking Society*, p. 43.

berkontribusi pada pembongkaran narasi pembangunan yang menormalisasi eksploitasi sumber daya alam.

Di sisi lain, pengembangan Ekologi Islam di Indonesia banyak dipelopori oleh Fachruddin M. Mangunjaya. Ia menegaskan bahwa Islam memiliki kerangka etika yang komprehensif untuk merespons krisis lingkungan modern.<sup>40</sup> Mangunjaya memandang kerusakan lingkungan sebagai bentuk kegagalan manusia menjalankan amanah Tuhan dan sebagai manifestasi ketidakadilan sosial.

Mangunjaya juga menekankan pentingnya keberpihakan pada kelompok rentan dalam wacana ekologi Islam. Dalam konteks pertambangan, masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak langsung harus menjadi subjek utama perlindungan lingkungan.<sup>41</sup> Perspektif ini memperkaya analisis gerakan JATAM dengan dimensi normatif dan etis yang kuat, khususnya dalam masyarakat Muslim seperti Kalimantan Timur.

Integrasi Ekologi Sosial Murray Bookchin dan Ekologi Islam Fachruddin M. Mangunjaya membentuk kerangka Ekologi Sosial Islam yang digunakan dalam penelitian ini. Ekologi Sosial memberikan analisis struktural terhadap relasi dominasi dan kapitalisme ekstraktif, sementara Ekologi Islam menyediakan landasan etis, moral, dan spiritual dalam perjuangan keadilan lingkungan. Kerangka ini memungkinkan pemahaman yang lebih

---

<sup>40</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), p. 55.

<sup>41</sup> Fachruddin M. Mangunjaya dan Jeanne Elizabeth McKay, "Reviving an Islamic Approach for Environmental Conservation in Indonesia," *Worldviews* 16, no. 3 (2012): 286–289.

komprehensif terhadap gerakan JATAM sebagai bentuk resistensi sosial-ekologis yang tidak hanya politis, tetapi juga etis dan religius.

Ekologi Sosial Islam dapat diposisikan sebagai pendekatan teoretis yang penting untuk memahami dinamika gerakan JATAM di Kalimantan Timur. Kerangka ini memungkinkan penelusuran yang lebih mendalam mengenai bagaimana krisis ekologis tumbuh dari struktur sosial dan sistem nilai yang dominan, bagaimana gerakan masyarakat sipil membangun strategi resistensi terhadap relasi kuasa yang timpang, serta bagaimana nilai-nilai Islam berperan dalam memperkuat perjuangan menuju keadilan sosial-ekologis dan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang secara sistematis menguraikan permasalahan, teori, metodologi, hasil penelitian, serta kesimpulan.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang mengenai kondisi eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur, serta munculnya resistensi masyarakat sipil melalui JATAM Kaltim. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoretis dan praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan yang menjadi pedoman penelitian.

Bab kedua membahas epistemologi JATAM sebagai gerakan advokasi lingkungan. Bagian ini menjelaskan bagaimana JATAM membangun pengetahuan kritis melalui investigasi lapangan, dokumentasi kerusakan

lingkungan, pengumpulan data korban tambang, serta analisis kebijakan. Epistemologi ini menjadi fondasi strategi advokasi JATAM serta sumber legitimasi moral dalam menghadapi narasi negara dan korporasi.

Bab ketiga menguraikan kondisi pertambangan di Kalimantan Timur dan ancaman kutukan sumber daya alam. Bab ini memaparkan perkembangan industri ekstraktif, dampak ekologis seperti lubang tambang, banjir, konflik lahan, serta ancaman sosial-ekonomi yang memperlihatkan relevansi konsep kutukan sumber daya alam. Data-data terbaru dari JATAM dan sumber lain digunakan untuk menunjukkan skala masalah dan struktur kekuasaan yang menopangnya.

Bab keempat menyajikan analisis hasil penelitian. Bagian ini mengkaji bagaimana ketidakadilan sosial-politik melahirkan fenomena kutukan sumber daya alam, bagaimana wacana pembangunan digunakan untuk melanggengkan eksploitasi, dan bagaimana JATAM bertindak sebagai agen moral kolektif dalam melakukan advokasi, kampanye publik, serta pendampingan komunitas. Analisis didasarkan pada data empiris dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum temuan utama terkait pola eksploitasi sumber daya alam dan bentuk-bentuk resistensi JATAM Kaltim, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan gerakan lingkungan untuk mewujudkan tata kelola sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai krisis ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif serta peran Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur dalam praktik gerakan ekologis berbasis ekologi sosial Islam, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Krisis ekologis di Kalimantan Timur memperlihatkan bahwa kutukan sumber daya alam bukanlah akibat keterbatasan alam, melainkan hasil dari struktur sosial dan politik yang menormalisasi eksploitasi melalui pembangunan ekstraktif. Relasi kuasa antara negara dan korporasi pertambangan telah melahirkan hierarki sosial yang meminggirkan masyarakat lokal, merusak ruang hidup, dan menciptakan ketidakadilan ekologis yang bersifat sistemik. Dalam perspektif Ekologi Sosial Islam, kondisi ini mencerminkan krisis ganda, yakni dominasi sosial sebagaimana dikritik dalam ekologi sosial Murray Bookchin dan krisis etika lingkungan sebagaimana dikemukakan oleh Fachruddin M. Mangunjaya. Alam diposisikan sebagai komoditas ekonomi semata, sementara nilai amanah, keadilan, dan keseimbangan ekologis terabaikan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan lubang tambang yang mengancam keselamatan,

tetapi juga berupa erosi sosial dan kultural masyarakat yang kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya.

2. Dalam konteks tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur menjalankan gerakan yang tidak sekadar bersifat teknis, tetapi berakar pada kritik struktural dan praksis etis. Melalui advokasi kebijakan, pendampingan masyarakat, investigasi lapangan, serta kampanye publik, JATAM menantang dominasi negara–korporasi yang mereproduksi ketidakadilan ekologis. Gerakan ini, dalam kerangka Ekologi Sosial Islam, dapat dipahami sebagai upaya membongkar hierarki sosial yang melahirkan kerusakan ekologis sekaligus sebagai praktik moral untuk mengembalikan relasi manusia dan alam pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Integrasi kritik Bookchin terhadap struktur dominasi dan etika lingkungan Islam menunjukkan bahwa perjuangan JATAM tidak hanya bertujuan menghentikan kerusakan, tetapi juga mendorong transformasi menuju tatanan sosial-ekologis yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penguatan gerakan lingkungan berbasis komunitas di wilayah terdampak ekstraktivisme, penting untuk melakukan pendokumentasian sistematis terhadap pengalaman masyarakat lokal, termasuk bentuk-bentuk



kerentanan sosial-ekologis dan praktik resistensi sehari-hari. Pemerintah daerah dan lembaga lingkungan perlu membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi komunitas terdampak serta melibatkan jaringan advokasi seperti JATAM dalam proses perumusan kebijakan agar pengelolaan sumber daya tidak lagi sarat dominasi negara– korporasi.

2. Untuk pengembangan kajian teoritik mengenai ekologi sosial di Indonesia, para akademisi dapat memperluas eksplorasi terhadap dinamika ketidakadilan ekologis di berbagai daerah ekstraktif dan memadukannya dengan analisis kritis tokoh Filsafat Lingkungan. Integrasi antara kerangka teori ekologi sosial dan pengalaman konkret gerakan masyarakat sipil seperti JATAM dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara struktur kekuasaan, krisis ekologis, dan gerakan perlawanan.
3. Untuk penelitian lanjutan terkait resistensi terhadap kutukan sumber daya alam, disarankan adanya studi perbandingan antara berbagai organisasi dan komunitas penolak tambang di Indonesia, seperti WALHI, AMAN, atau jaringan masyarakat adat di Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian politik, ekologi kritis, dan studi gerakan sosial akan sangat membantu memperluas pemahaman mengenai strategi resistensi dan model transformasi sosial-ekologis yang lebih adil serta berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). *Laporan Tahunan Masyarakat Adat 2021*. Jakarta: AMAN, 2021.
- . *Laporan Masyarakat Adat dan Konflik SDA 2024*. Jakarta: AMAN, 2024.
- Ambarwangi, Arum. “Keterlibatan Perempuan Dalam Gerakan Sosial.” *Jurnal Komunikasi Massa* 13, no. 2 (2023): 1–23. <https://doi.org/...>
- ANTARA News Kalimantan Timur. “Satgas IKN Temukan 4.000 Hektare Kawasan Tambang Tanpa Izin.” 27 Oktober 2025.
- Aslam. “Peran Al-Qur’an sebagai Sumber Etika Lingkungan: Studi Analisis Ayat-Ayat tentang Alam Semesta.” *JIGAMNA: Jurnal Ilmu Agama Indonesia* 1, no. 1 (2025): 7–12. <https://doi.org/...>
- Asyifani, Khalis. “Contentious Politics: Strategi Internal dan Eksternal Mobilisasi Gerakan Sosial dalam Koalisi.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 3 (2024): 428–47.
- Auty, Richard. *Sustaining Development in Mineral Economies*. London: Routledge, 1993.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- . *Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- . *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur 2024*. Samarinda: BPS Kaltim, 2024.
- . *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2024*. Samarinda: BPS Kaltim, 2024.
- . *Kondisi Air Bersih Rumah Tangga 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Bank Indonesia Kaltim. *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Mei 2024*. Samarinda: BI Kaltim, 2024.
- Bookchin, Murray. *Post-Scarcity Anarchism*. San Francisco: Ramparts Press, 1971.
- . *Post-Scarcity Anarchism*. Montreal: Black Rose Books, 1971.
- . *Remaking Society*. Montreal: Black Rose Books, 1989.

- . *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Oakland: AK Press, 2005.
- . *The Next Revolution*. London: Verso, 2015.
- . *Toward an Ecological Society*. Montreal: Black Rose Books, 1980.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Cahyadi, Andi. “Pengetahuan Partisipatif dalam Advokasi Lingkungan.” *Jurnal Wacana Hijau* 2, no. 1 (2019): 37–48.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- Dewan Energi Nasional. *Indonesia Energy Outlook 2024*. Jakarta: DEN, 2024.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. *Laporan Deforestasi Kalimantan Timur 2024*. Samarinda: Dinas Kehutanan Kaltim, 2024.
- Farihen, Farihen, dan Abdul Hakim. “Pandangan Islam terhadap Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* 3, no. 1 (2025): 299–302. <https://doi.org/...>
- Fauzi Rachman, Noer. *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: INSIST Press, 2012.
- Finka, Amalia, dan Zulfa Emalia. “Fenomena Kelimpahan Sumber Daya Alam dan Natural Resource Curse dalam Perspektif Ekonomi di Pulau Sumatera.” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2022): 737–750.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Continuum, 1970.
- Greenpeace Indonesia. *Batubara dan Krisis Iklim di Indonesia*. Jakarta: Greenpeace, 2020.
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Harvey, David. *Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geographical Development*. London: Verso, 2006.
- Harvey, David. *The Limits to Capital*. London: Verso, 2006.

Indradi, Yuyun. "Ekologi Digital dan Akses Pengetahuan." *Jurnal Ruang Publik* 3, no. 2 (2020): 35–44.

———. "Membangun Narasi Alternatif terhadap Industri Ekstraktif." *Prisma* 34 (2015): 89–98.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). *Catatan Akhir Tahun Tambang Indonesia*. Jakarta: JATAM, 2022.

———. *Ekstraktivisme dan Perlawanan Rakyat*. Jakarta: JATAM, 2021.

———. *Kampanye Lingkungan Digital*. Jakarta: JATAM, 2021.

———. *Laporan Advokasi Pertambangan 2019*. Jakarta: JATAM, 2019.

———. *Laporan Penelitian Dampak Sosial Tambang 2023*. Jakarta: JATAM, 2023.

———. *Lubang Tambang dan Krisis Lingkungan di Kalimantan Timur*. Samarinda: JATAM, 2015.

———. *Media Digital dan Advokasi Lingkungan*. Jakarta: JATAM, 2022.

———. *Pemetaan Konflik Tambang Indonesia*. Jakarta: JATAM, 2020.

———. *Peta Digital Tambang Indonesia*. Jakarta: JATAM, 2022.

———. *Sekolah Energi Rakyat*. Samarinda: JATAM, 2019.

———. *Tambang, Negara, dan Krisis Sosial*. Jakarta: JATAM, 2023.

———. *Tambang dan Krisis Ekologi di Indonesia*. Jakarta: JATAM, 2019.

———. *Laporan Tahunan JATAM 2024 – Bara Perlawanan Warga Biasa Melawan Mesin Ekstraktivisme*. Jakarta: JATAM, 2025.

JATAM Kalimantan Timur. *Catatan Lapangan Aksi Tambang Kaltim*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2018.

———. *Dari Wisata Juang Menuju Kota Limbah Tambang*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2024.

———. *Datang Menanam dan Bertahan*. Samarinda: JATAM Kaltim, 2025.

———. *Krisis Ekologi dan Tambang Batubara di Kalimantan Timur*. Samarinda: JATAM, 2018.

- . *Laporan Perempuan dan Tambang Kalimantan Timur*. Samarinda: JATAM & Solidaritas Perempuan, 2020.
- . *Limbung di Gunung Layung*. Samarinda: JATAM, 2024.
- . *Nyapu: Bagaimana Perempuan dan Masyarakat Adat Balik Mengalami Kerusakan Berlapis akibat IKN*. Samarinda: JATAM, 2023.
- . *Peringatan Dini Bencana Krisis Sosial Ekologi*. Samarinda: JATAM, 2024.
- . “Korban ke-49 Lubang Tambang di Kaltim.” Laporan Kasus, 2025.
- . “Surat Edaran ESDM: 190 Perusahaan Batubara Dihentikan Sementara, Rakyat Tetap Jadi Korban.” Siaran pers, 22 September 2025.
- . “Kejati Segera Tetapkan PT Kencana Wilsa Sebagai Tersangka.” Siaran pers, 13 November 2025.
- Jonas, Hans. *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Kementerian Dalam Negeri RI. *Evaluasi Desentralisasi dan Tata Kelola SDA 2024*. Jakarta: Kemendagri, 2024.
- Kementerian ESDM. *Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2024*. Jakarta: ESDM, 2024.
- . *Statistik Minerba 2024*. Jakarta: ESDM, 2024.
- Kementerian Keuangan RI. *Laporan Dana Bagi Hasil SDA 2024*. Jakarta: Kemenkeu, 2024.
- Komnas HAM. *Hak Asasi dan Krisis Ekologis Tambang Batubara*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Komnas Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kajian Perizinan Pertambangan di Indonesia 2024*. Jakarta: KPK, 2024.
- Kompas. “Kawasan Lindung IKN Tak Luput dari Tambang Liar.” 23 April 2025.
- . Liputan banjir tambang dan krisis air bersih di Kaltim, edisi 2024–2025.
- Kompas.com. “IKN Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kaltim.” 11 Februari 2024.
- Kompas.id. “Catatan 2024: Kaltim, Bom Waktu Konflik Pertambangan dan IKN.” 31 Desember 2024.

———. “Konflik Tanah untuk IKN Masih Mengemuka.” 2024.

KontraS. *Tambang dan Kekerasan Struktural*. Jakarta: KontraS, 2018.  
KontraS & JATAM. *Stop Lubang Tambang*. Jakarta: KontraS–JATAM, 2019.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). *Catatan Akhir Tahun 2024*. Jakarta: KPA, 2024.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Reflita, dkk. “Eksplorasi Alam dan Perusakan Lingkungan.” *Substantia* 17, no. 2 (2025): 57–64.  
<https://doi.org/...>

LBH Jakarta. *Hak Atas Lingkungan dan Korban Tambang*. Jakarta: LBH Jakarta, 2021.

Lembaga Penelitian Unmul & JATAM. *Studi Dampak Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang 2023*. Samarinda: Unmul–JATAM, 2023.

Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam dalam Islam*. Edisi revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.

———. *Generasi Terakhir: Aktivisme Dunia Muslim Mencegah Perubahan Iklim dan Kepunahan Lingkungan Hidup*. Jakarta: LP3ES, 2021.

———. “Etika Agama sebagai Platform Menggalang Kesadaran Konservasi.” Dalam *Metode dan Kajian Sumber Daya Hayati dan Lingkungan*, disunting oleh Jatna Supriatna, 487–492. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021.

———. “Keseimbangan Ekologi dan Iklim.” Dalam *Islam dan Kelestarian Alam*, disunting oleh R. A. Mat Yamin, 71–101. Kuala Lumpur: IKIM, 2022.

Mangunjaya, Fachruddin M., dan Edy Hendras Wahyono. *Panduan Ekopesantren*. Jakarta: LP3ES, 2022.

Mangunjaya, Fachruddin M., dan Muhammad Zulham. *Pengantar Berpikir Kritis*. Jakarta: Merah Putih, 2025.

Mangunjaya, Fachruddin M., H. Heriyanto, dan R. Gholami, eds. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Mangunjaya, Fachruddin M., dan İbrahim Özdemir. “Sustainability and Communities of Faith: Islam and Environmentalism in Indonesia.” Dalam *Civic Engagement in Asia: Stories of Transformative Learning in the Work for a*



*Sustainable Future*, disunting oleh M. Indrawan, 257–264. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.

Marcuse, Herbert. *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*. Boston: Beacon Press, 1964.

Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. 1. Translated by Ben Fowkes. London: Penguin, 1976.

Marx, Karl. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Translated by Martin Milligan. Moscow: Progress Publishers, 1959.

Media Kaltim. “JATAM Laporkan Dugaan Pelanggaran Reklamasi Tambang di Kutai Barat.” 29 Mei 2025.

———. “Jatam: Pemprov Jangan Cuci Dosanya Perusahaan Tambang.” 14 Januari 2025.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muliono, Nasuhaidi. “Gerakan Sosial Anak Muda dalam Demokrasi Elektoral 2024.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 9, no. 4 (2024): 307–313.

Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle*. Translated by David Rothenberg. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

NomorSatuKaltim. “Jatam Desak Gubernur Rudy Mas’ud Lakukan Reklamasi 44 Ribu Lubang Tambang.” 23 Februari 2025.

Ostrom, Elinor. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Prasetyo, Andri. *Ekonomi Politik Energi di Indonesia*. Bogor: Sajogyo Institute, 2016.

———. “Gerakan Ekologis dan Politik Tubuh.” *Jurnal Antropologi Indonesia* 39, no. 2 (2020): 60–72.

Polanyi, Karl. *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press, 2001.

Radar Samarinda. “Lemahnya Penegakan Hukum, Kini Tercatat 54 Nyawa Melayang di Lubang Tambang.” 27 Juli 2025.

- Rahma, Hania. "Tata Kelola SDA dalam Mekanisme Transmisi Resource Curse di Kaltim." *Auriga Nusantara* 11 (2020). <https://doi.org/...>
- Rini, Utari Retno Sulisty, Emanuel G. Manek, dan Kurnia Dewi Mulyani. "Analisis Potensi Resource Curse pada Pertambangan Timah Bangka Belitung." *Jurnal GEOSAPTA* 11, no. 2 (Juli 2025): 1–12.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Canberra: Asian Studies Association of Australia, 1986.
- Rohayah, Siti. "Pendidikan Politik Ekologis dalam Gerakan Sosial." *Jurnal Transformasi Sosial* 5, no. 2 (2018): 70–82.
- Saputro, Y. R., dan L. Makhasin. "Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Mineral dan Batubara Era Jokowi." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 9, no. 2 (2024): 46–61. <https://doi.org/...>
- Setiawan, Dani. "Gerakan Sosial Baru dan Ekologi Politik di Indonesia." *Jurnal Politik UI* 3, no. 2 (2017): 130–145.
- . "Gerakan Sosial dan Produksi Pengetahuan." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2020): 29–40.
- Sholikin, Ahmad. "Teori Resource Curse dalam Perspektif Ilmu Politik." *Madani* 12, no. 1 (2020): 24–40. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1898>
- Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology, and Development*. London: Zed Books, 1989.
- Sibatuara, Enjelina, dan Vera W. S. Soemarwi. "Dampak Pengelolaan SDA Mineral–Batubara di Indonesia." *JSSH* 1, no. 1 (2023): 315–320. <https://doi.org/...>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syaifudin, dan Ali Mahmud. "Lingkungan Perspektif Al-Qur'an." *SAMAWAT* 7, no. 1 (2023): 3–4. <https://doi.org/...>
- Taufiq, M. "Korelasi Pengelolaan Pertambangan dan Negara Hukum Kesejahteraan." *SOCIAL: Jurnal IPS* 4, no. 3 (2024): 265–273. <https://doi.org/...>
- Tempo. "Sedimentasi Pesisir PPU Meningkat." 2024.
- Ulum, Riskiyanto B. "Gerakan Sosial Penolakan Tambang Desa Wadas." *Social Studies* 8, no. 1 (2023): 1–10.

Universitas Mulawarman & JATAM. *Studi Dampak Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang 2023*. Samarinda: Unmul–JATAM, 2023.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). *Aksi Lingkungan dan Perlawanan Warga*. Jakarta: WALHI, 2020.

———. *Atlas Konflik Lingkungan Indonesia*. Jakarta: WALHI, 2019.

———. *Catatan Akhir Tahun Lingkungan Hidup 2017*. Jakarta: WALHI, 2017.

———. *Demokrasi, Ekologi, dan Keadilan Sosial*. Jakarta: WALHI, 2019.

———. *Ekonomi Ekstraktif dan Krisis Sosial*. Jakarta: WALHI, 2018.

———. *Ekonomi Ekstraktif dan Krisis Sosial di Indonesia*. Jakarta: WALHI, 2024.

———. *Gerakan Ekologis dan Transformasi Sosial*. Jakarta: WALHI, 2021.

———. *Krisis Iklim dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*. Jakarta: WALHI, 2020.

———. *Laporan Lingkungan Hidup Indonesia 2020*. Jakarta: WALHI, 2020.

———. *Laporan Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: WALHI, 2021.

———. *Laporan Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. Jakarta: WALHI, 2022.

———. *Laporan Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: WALHI, 2024.

———. *Sekolah Ekologi dan Perubahan Iklim*. Jakarta: WALHI, 2019.

———. *Tambang di Tengah Krisis Iklim*. Jakarta: WALHI, 2021.

WALHI Kaltim. *Laporan Investigasi Lingkungan 2024*. Samarinda: WALHI Kaltim, 2024.

WALHI & JATAM. *Tambang, Energi, dan Krisis Iklim*. Jakarta: WALHI–JATAM, 2023.

Wijaksono, Dwi Nur Akbar. *Ekologi Sosial: Pemikiran Murray Bookchin*. Skripsi. Bandung: UPI, 2017.

Yui Zahana, Dadang Hikmah Purnama, dan Diana Dewi Sartika. “Gerakan Sosial Perempuan Pejuang Seribandung.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 2 (2024): 556–574.